

PEMILU 2019 DAN PILIHAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

DIAN KARTIKASARI

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

LATAR BELAKANG

POSISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

**MENGAPA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA MENGAMBIL POSISI :
MEMILIH DAN DIPILH (TIDAK GOLPUT) DALAM TIAP PEMILU**

- 1. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA LAHIR KARENA ADANYA DEMOKRASI**
- 2. VISI : TERWUJUDNYA KESETARAAN & KEADIAL GENDER DALAM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, SEJAHTERA DAN BERADAB**
- 3. SATU DARI ENAM MISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA ADALAH :
PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN**
- 4. MEMPERJUANGKAN JAMINAN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN, SEJAK PEMILU 1999 DAN BARU BERHASIL PADA 2003,
DIAKOMODIRNYA JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA 30%
KETERWAKILAN PEREMPUAN**

UPAYA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

1. **PENDIDIKAN POLITIK KADER / ANGGOTA**
2. **MENGAWAL PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN**
3. **PENDIDIKAN & AKSI MERESPON PEMILU**
 - 1) **PENDIDIKAN PEMILIH**
 - 2) **MENDORONG PEREMPUAN /KADER MENGIKUTI PROSES REKRUITMEN POLITIK & REKRUITMEN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU**
 - 3) **PELATIHAN CALON LEGISLATIF**
 - 4) **PEMANTAUAN PEMILU**
 - 5) **PENGAWALAN HAK PILIH DAN SUARA**
4. **MENERBITKAN KEBIJAKAN INTERNAL ORGANISASI**

KEBIJAKAN INTERNAL ORGANISASI

- ▶ **KEBIJAKAN INTERNAL ORGANISASI DIPERLUKAN KARENA :**
 - ▶ **KEPENGURUSAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA BERADA DI TINGKAT DESA, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL**
 - ▶ **JUMLAH PENGURUS MENCAPAI 1600 ORANG**
 - ▶ **JUMLAH ANGGOTA MENCAPAI 43.000**
- ▶ **KEBIJAKAN INTERNAL ORGANISASI BERTUJUAN UNTUK :**
 - ▶ **MENYEPAKATI SIKAP DAN PERILAKU PENGURUS**
 - ▶ **MENYEPAKATI SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA**

KEBIJAKAN INTERNAL ORGANISASI

- ▶ **DIPUTUSKAN DALAM RAPAT KERJA NASIONAL SEBAGAI FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI TERTINGGI SETELAH KONGRES NASIONAL**
- ▶ **RESPON PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN 2014**
 1. **SK RAKERNAS: 03 /RAKERNAS/I/2013 TENTANG IMPLEMENTASI SIFAT NON PARTISAN ORGANISASI**
 2. **SK RAKERNAS : 03 /RAKERNAS/I/2014 TENTANG SIKAP POLITIK KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

► RESPON PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DAN ANGGOTA DEWAN 2019

1. KODE ETIK ANGGOTA DAN PENGURUS DALAM MERESPON PEMILU 2019
2. TEKNIS PRAKTIS PEMANTAUAN PEMILU
3. STRATEGI KAMPANYE PENINGATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
4. SK TENTANG PELAKSANAAN SIFAT NON PARTISAN ORGANISASI
5. SK TENTANG SIKAP POLITIK KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN 2019

KODE ETIK ANGGOTA DAN PENGURUS DALAM MERESPON PEMILU 2019

- 1. PENGURUS DAN ANGGOTA KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TIDAK TERLIBAT POLITIK PECAH BELAH (ADU DOMBA)**
- 2. PENGURUS TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJADI TIM SUKSES, TIM RELAWAN, DAN TIM KAMPANYE PASANGAN CAPRES-CAWAPRES (TERMASUK PARPOL)**
- 3. PENGURUS TIDAK MENGGUNAKAN DAN ATAU MENGGERAKKAN ANGGOTA DAN KEKAYAAN ORGANISASI UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CAPRES-CAWAPRES**
- 4. ANGGOTA TIDAK DIPERBOLEHKAN ATAU MENGGUNAKAN BENDERA, ATRIBUT KOALISI PEREMPUAN INDONESIA PADA SAAT KAMPANYE**
- 5. DALAM HAL MENERIMA DAN MEMBAGIKAN INFORMASI, ANGGOTA DAN PENGURUS HARUS MEMASTIKAN SUMBER DAN KEBENARAN INFORMASI TERSEBUT, SEBELUM DIBAGIKAN KEPADA ORANG LAIN**
- 6. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA MENDUKUNG CALEG PEREMPUAN SESUAI SESUAI VISI, MISI DAN NILAI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN Keadilan Gender**
- 7. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA MENDORONG PENGURUS, ANGGOTA DAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH (TIDAK GOLPUT) DEMI MEWUJUDKAN Keadilan dan Demokrasi**

SIKAP POLITIK TERHADAP PEMILU 2019

**PANDANGAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP PEMILU 2019,
BAHWA**


- 1. PEMILU SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT**
- 2. PEMILU SEBAGAI SARANA PERUBAHAN BANGSA DAN NEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK**
- 3. PEMILU HARUS MENEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI SUBYEK**
- 4. PEMILU MENJADI SUMBANGAN BAGI PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA MENGHINDARI KRISIS POLITIK**
- 5. MENJADI GOLPUT SAMA HALNYA MEMBIARKAN CALON PEMIMPIN YANG TIDAK SESUAI VISI, MISI DAN NILAI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA, MEMENANGKAN PEMILU**
- 6. MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU 2019, HARUSLAH DIDASARKAN PADA PENGETAHUAN, KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PILIHANNYA UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS**

PEMILU LEGISLATIF 2019

A. TIDAK MEMILIH CALON YANG

1. PELAKU PELANGGARAN HAM, HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK
2. PELAKU POLIGAMI
3. PELAKU KEJAHATAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
4. PELAKU DISKRIMINASI DAN KEKERASAN,
5. MENGGUNAKAN SARA UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN
6. PERUSAK LINGKUNGAN
7. SEKEDAR MENGANDALKAN POPULARITAS DAN TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI
8. PELAKU PENYELEWENGAN KEKUASAAN

B. MEMILIH CALON YANG, LIHAT BUTIR A DAN :

- 1. DIKENAL LUAS AKTIF MELAKUKAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN**
 - 2. DEKAT DAN MUDAH DIJANGKAU KONSTITUEN DAN MASYARAKAT UMUM**
 - 3. MENANGGAPI HARAPAN KONSTITUEN DAN MASYARAKAT SECARA BERADAB**
 - 4. MEMILIKI AGENDA KERJA NYATA, TERUKUR DAN MUDAH DIPAHAMI**
 - 5. MEMEGANG TEGUH PRINSIP KEJUJURAN**
 - 6. BERKOMITMEN TERHADAP KEUTUHAN NEGARA, TOLERANSI DAN MENGHARGAI KEBERAGAMAN**
- 

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. TIDAK MEMILIH CAPRES DAN CAWAPRES YANG

1. PELAKU PELANGGARAN HAM, HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK
2. PELAKU POLIGAMI
3. PELAKU KEJAHATAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
4. PERUSAK LINGKUNGAN
5. MENDISKRIMINASI /TIDAK ADIL TERHADAP SUKU, RAS AGAMA, ALIRAN (SARA) DAN GENDER TERTENTU
6. PELAKU PENYELEWENGAN KEKUASAAN

B. MEMILIH CAPRES DAN CAWAPRES, LIHAT BUTIR A DAN:

1. BERKOMITMEN TERHADAP HAM, HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK
2. MEMILIKI REKAM JEJAK KEPEMIMPINAN YANG EGALITER, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
3. MEMILIKI AGENDA KEBERPIHAKAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN
4. BERKOMITMEN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
5. BERKOMITMEN MENJAGA KEUTUHAN NEGARA, MENCEGAH KONFLIK, RADIKALISME, EKSTREMISME DAN MEWUJUDKAN PERDAMAIAN

KOMITMEN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

MELAKUKAN :

- 1. MENDUKUNG DAN MENSUKSESKAN PEMILU BERJALAN LUBER-JURDIL, TANPA KEKERASAN, AKSESIBLE DAN RAMAH LINGKUNGAN**
- 2. PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN SUARA**
- 3. PEMANTAUAN PROSES PEMILU**
- 4. SINERGI DENGAN PENYELENGGARA PEMILU DAN MASYARAKAT SIPIL**
- 5. PELAPORKAN DUGAAN KECURANGAN, PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA**

MENOLAK

- 1. SEGALA BENTUK POLITIK UANG**
- 2. SEGALA BENTUK KECURANGAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG UNTUK MEMENANGKAN PEMILU**
- 3. SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DAN KEKERASAN**

TERIMA KASIH

